



Sekapur Sirih "Pusat Peranserta Masyarakat"



SEKAPUR SIRIH

PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT (Centre for People Participation)

Jl. Masjid Al Fajri /F Nomor 3 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

Website: ppmnasional.org.Email : dpn.ppm@gmail.com



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, berdiri pada tanggal 30 Januari 1985, pada usianya yang ke-3, PPM tersebar dan berkarya dalam pengembangan masyarakat di seluruh tanah air, meski dalam kadar kurang lebih. Sebagai ormas PPM bertekad untuk tumbuh sebagai organisasi terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk kebangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (BKNRI). Keberadaan PPM diharapkan dapat menyempurnakan upaya pelembagaan peranserta masyarakat, disamping keberadaan ormas lainnya yang telah ada seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

PPM sepenuhnya sadar dengan distingtif yang diembanya untuk secara konsisten bergerak di bidang (i) pengembangan sosial-kerakyatan dan ekonomi-kerakyatan, (ii) bersikap non partisan, nonprimodial dan non spasial guna menjembatani hubungan antara subkultur untuk ikut menumbuhkan persatuan dan kesatuan (BNKRI), (iii) mengambil peranan aktif dan konstruktif dalam pembangunan nasioonal sebagai pembangunan kerakyatan, dan (iv) mengambil peran aktif dan proaktif dalam hunungan international dalam kerangka Melayu Antarbangsa, Dunia Islam, regionalisme Samudera Pasifik, Regionalisma Samudera Hindia, serta kerja sama masyrakat negara kepulaaun Pasifik Selatan.

Pada era infromasi ini PPM memikul tanggung jawab penting dalam mewujudkan *popular leberalism dan popular capitalism* agar sektor - kerakyatan mampu tumbuh sebagai pilar terbesar dalam menyangga perekonomian nasional, disamping peran dunia usaha swasta, BUMN dan sektor pemerintahan; dengan sumbangan sekitar 68% dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2020. Dalam alam *open and free democracy* PPM sebagai bukan organisasi politik peserta pemilu harus mengambil peran yang tepat, tertimbang dan terukur bagi terwujudnya sistim politik dan tata pemerintahan yang produktif dan efesien menuju kebangkitan Indonesia 2020.

Percikan pemikiran ini diharapkan dapat menjadi salah satu prespektif untuk memahami PPM melalui Sekapur Sirih yang tipis ini.

Wassaalmu'alaikum wr wb

Jakarta, 30 Januari 2022


Eko Suryono
Ketua Presidium


Anwar Hariyono
Seketaris Jenderal



PENDAHULUAN

Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) adalah organisasi kerjasama nasional yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, untuk membangkitkan dan menguatkan prakarsa, peranserta, dan swadaya masyarakat dalam pemenuhan minat, kebutuhan, dan kepentingannya.

PPM berdiri pada tanggal 30 Januari 1985 M (tanggal 9 Jumadil Awal 1405 H), pada Pertemuan Nasional I di Kaliurang Yogyakarta; berakta yayasan Nomor 27 tanggal 5 Juni 1987 pada Notaris Yudo Paripurno, S.H. Selanjutnya PPM Nasional mendaftarkan kepada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tingkat nasional, dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1985.

PPM terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia yang berminat mengembangkan peranserta dalam pengembangan masyarakat. Peran serta anggota PPM ditampung dalam Lembaga Swadaya Fungsional (LS/F) pada tingkat desa atau di kalangan masyarakat sekerja. Jaringan kerjasama antara LS/F pada tingkat kabupaten dan kotamadya dikonstruksikan dalam PPM Daerah, selanjutnya pada tingkat propinsi dalam PPM wilayah.

PPM memberikan pelayanan dalam delapan bidang pokok pengembangan masyarakat, yaitu : sosial ekonomi, pendidikan alternatif, kesehatan masyarakat, teknologi tepat, lingkungan hidup, sosial budaya, kependudukan/transmigrasi, dan emansipasi sosial. Pendekatan program yang dipilih ialah melalui pengembangan stelsel desa sejahtera (qaryah thayyibah), serta jaringan kerjasama antar qaryah untuk pengembangan kawasan.

SEKILAS LAHIRNYA PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT

Pusat Peranserta Masyarakat berdiri di awal tahun 1980 an, adanya kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) -BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) inti dari dua kebijakan ini adalah mengebiri kegiatan aktifitas politik mahasiswa. Kebijakan ini dirasakan oleh para mahasiswa sebagai bentuk dan cara pemerintah telah mengebiri ruang lingkup gerakan kemasyarakatan. Para – para aktifis dan tokoh mahasiswa antara lain Adi Sasono sebagai direktur Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Dawam Rahardjo direktur (LP3ES), Dhworowawi Istitute melalui Lembaga Pendapat Umum dan Pengembangan Masyarakat (LPUPM) melakukan lokakarya gerakan dakwah bil hal di Malang. Kemudian dilanjutkan gerakan dakwah bil hal di Jogjakarta oleh Dhworowati Istitute yang dipelopori oleh Ali Mustafa Trajutisna, Ki Suratno Hayuningrat, dan Seowarsono. Gerakan dakwah pembangunan ini akhirnya menyebar keseluruh pelosok indonesia, dimulai dari Jakarta melalui Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Kelompok Pemulung di pelopori



oleh Mujito, Salman Al Farisi lalu mendirikan Yayasan Ummu Salamah. Di Bandung dengan Bina Karya yang di motori oleh Ali Thoyib, Adin Restiadi. Kumbo Karno Istitut di Semarang, LPTP di Solo yang motori oleh Bambang Agussalam, Hari Mulyadi, Yayasan Muhammadiyah yang gerakan oleh Adil Amrrullah, Faruq Abdillah, Lalu Gafar Ismail (Malang). Di Bali dengan Yayasan Fajar Jua di pelopori oleh H.S.H. Adnan, Drs Mulyono, Drs. Suharyono, Parito, Erwin M Fauzi, wilayah Lombok di motori oleh Lalu Mujitahid, Hamidan dan dari berbagai aktifis mahasiswa bersepakat melakukan gerakan dakwah pembangunan. Kegiatan dakwah pembangunan diawali dengan pilot proyek bekerja sama dengan Departemen Agama Pusat dengan melibatkan para Dai Rabithah Alam Islami se DIY dan Jawa Tengah.

Pengembangan Reseach aksi partisipatif diawali dengan pilot proyek yang dikerjakan oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Solo, Dhworowati Istitute di Yogyakarta, Himpunan untuk Penelitian dan Pengembangan (HP2M) di Jakarta. Pada tahun 1989 di Yogyakarta mulai di rintis Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKY) yang selanjutnya menjadi embrio berdirinya Asosiasi Pedagang Kaki Lima se – Indonesia. Pada bulan Pebruari 1992 dilakukan Musyawarah Nasional I Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya merupakan awal mulainya gerakan Pedagang Kaki Lima seluruh Indonesia . Selanjutnya gerakan pengembangan ekonomi dengan melalui koperasi – koperasi se Indonesia yang didukung oleh Departemen Koperasi yang menteri Bustanul Arifin. Gerakan koperasi meliputi wilayah Irian Jaya di motori Toha Al Hamid, Sulawesi Utara oleh Harun Wasolo, Sulawesi Selatan oleh Ridwan Kara. Untuk Wilayah Kalimantan Timur dengan melakukan pembinaan dan renovasi pasar yang kemudian menjadi Pasar Citra Niaga yang didukung Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Dengan pembangunan Pasar Citra Niaga.

Pertemuan Nasional I Pusat Pengembangan Masyarakat yang diikuti oleh berbagai tokoh - tokoh mahasiswa dan Lembaga – Lembaga Swadaya yang kemudian memilih Adi Sasono, Ali Mustafa Trajutisna, Hery Yusei Yuswanto dan Habib Chirzin sebagai Dewan Direktur Pusat Pengembangan Masyarakat periode 1985 - 1989.

Awal Tahun 1985 untuk pertama kali di lakukan Pertemuan Nasional I sebagai tahun berdirinya Pusat Peranserta Masyarakat tepatnya tanggal 31 Januari, dengan delapan program bidang antara lain; sosial ekonomi, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat, pengembangan lingkungan hidup, emansipasi sosial, pengembangan sosial budaya, dan kependudukan transmigrasi. Pertemuan Peirode 1985 -1989 ini mulai gerakan mendukung berdirinya sekolah tinggi wiraswasta,yang di pimpin oleh Utomo Danan Jaya. Gerakan PPM berkembang pada tingkat di Propinsi, Kabupten antara lain Yayasan Pembinaan Orang Miskin dan Anak Yatim (YASTIMAKIN) di Jepara oleh Sutrisno, di Kudus dimotori oleh Munif dan Maesaroh,Mir'ah, Farida Nur Khosim dan Khosim Khofifah dengan gerakan pemulungnya. PPM Rembang melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir oleh para wanita nelayan yang motori oleh Maimun, Kepala Desa



Bajing Jiwo Sarang. Kegiatan masyarakat ekonomi tapi hutan dengan pilot proyek Bumi Ayu Jawa Tengah , di pelopori oleh Sri Muyaningsih (nuning) yang di dukung oleh Ford Foundation, yang mengantar Ani Sutoro meraih gelar Doktor. PPM Malang oleh Damahuri, PPM Pekalongan oleh Daldiri dan wilayah Jogyaakarta dengan kegiatan Kelompok Bantuan Desa di motori oleh Imam Nur Hidayat serta Kelompok Usaha Bersama (KUB), PPK Sido Arum di motori oleh Ibu Lurah Sido Arum,

Pada Pertemuan Nasional ke II tahun 1989, di Umbul Harjo, Pusat Pengembangan Masyarakat melakukan perubahan nama menjadi **Pusat Peranserta Masyarakat (centre for people participation)** dan perubahan kepepimpinan dari Dewan Direktur menjadi Presidium. Pada PENAS II telah terpilih lima Presidium; Hadimulyo, Ki Suratno Hayuningrat, Mursalin Dahlan, Parito Hariyadi, sebagai Sekretaris Jenderal Abdul Aziz untuk Periode 1989 – 1994..

Pada tahun 1984 ini dilakukan kerja sama dengan Yayasan Asmad untuk mengembangkan masyarakat Asmad yang diketuai oleh Hari Suhud (Yayasan asmad), bersama dengan KNPI Pusat. Gerakan pembinaan dan pengembangan terhadap membuat pengembangan terhadap Pedagang Kali Lima, di dukung oleh Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian (Hartanto), Menteri Pemuda dan Olah Raga (Akbar Tajung), Kementrian Tenaga Kerja (Cosmos Batubara). Gerakan ini telah mengantarkan Didid Supriyadi menjadi Ketua KNPI. Kegiatan ini merupakan cikal bakal lahirnya Lembaga Jaringan Pengembangan Sektor Informal.

Pada masa periode ini dipelopori oleh Ija Rahmad membentuk Asosiasi Pedagang Grosir Keliling se Indonesia (APGKI) yang beranggotakan 1.000 pedagang grosir melakukan kerja sama dengan 5 (lima) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain PLN, PUSRI, Perumnas, Kawasan Berikat Nusantara dan Aneka Tambang melakukan pembinaan dan bantuan permodalan kepada para anggotanya. Tahun 1984 bersama dengan Ikatan Cedikawan Muslim Indonesia (ICMI) mengadakan Konvensi Nasional Pesantren Kejuruan yang di buka oleh Prof DR. BJ Habibi, yang telah melahirkan Pengembangan Pesantren Kejuruan. Pengembangan Pesantren Kejuruan mendapat dukungan dari Departemen Pendidikan yang menterinya ketika itu Wardiman Joyonegoro, sebagai pailot proyek nya adalah berdirinya Pesanteran Kejuruan Ummatan Washaton di Tanjung Alaih Padang Sumatra Barat, kemudian di susul berdirinya Pesantren Kejuruan Ummmatan Washathon di berbagai daerah antara lain di Imogiri Jogyaakarta, Ngadiluweh Kediri, Bondowoso JawaTimur. Pusat Peranserta Masyarakat bersama dengan ICMI membidani berdirinya International Islamic Forum for Science, Technology, and Human Resources Development (IIFTIHAR)



LATAR BELAKANG

Perkembangan penduduk dan kualitas manusia Indonesia menunjuk pada adanya keprihatinan yang mendalam terhadap arti pentingnya pengatasan masalah arus atas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, serta arus bawah berupa sistem/struktur dan tata nilai budaya yang masih pancaroba dan belum fungsional. Masa depan bangsa sangat tergantung pada kemampuan bersama rakyat dalam pengatasan masalah kehidupan dan ke-budayaan ini, yang terlibat pada kemampuan untuk mewujudkan tata sosial, ekonomi, dan kebudayaan alternatif yang mengacu kepada kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu pembangunan hendaknya lebih diartikan sebagai keseluruhan upaya untuk mengembangkan potensi swadaya rakyat, sebagai pencerminan runtut dari kesadaran imani dan kepentingan nyata. Hal ini memerlukan prasyarat terbentuknya pratata dan pranata kemasyarakatan yang mendukung yang dapat dirintis melalui penggalangan kelembagaan swadaya fungsional pada setiap lingkungan hidup budaya terkecil setingkat desa/kampung dan di lingkungan masyarakat sekerja, serta jaringan kerja di antaranya pada seluruh tingkatan. Pengorganisasian kegiatan peran serta ini diperlukan untuk membangun suatu wahana belajar untuk bersama pada keniscayaan budaya, juga dalam rangka mengupayakan umpan balik untuk pembaharuan kebudayaan itu sendiri .

Atas dasar pertimbangan di atas dan didorong oleh kesadaran untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara, maka bangkitlah suatu organisasi kemasyarakatan, bernama Pusat Peranserta Masyarakat atau PPM sebagai organisasi gerakan kebudayaan.

TUJUAN

Tujuan umum PPM ialah membangkitkan (*awakening*) dan menguatkan (*empowering*) dan membela (*advocating*) tumbuhnya prakarsa, peranserta, dan swadaya masyarakat agar masyarakat mampu membangun diri sendiri (*self improving*) menolong diri sendiri (*self helping*) dan berdiri di atas kaki sendiri (*self reliabcing*) dalam pemenuhan minat, kebutuhan dan kepentingan beramanya (*tegetheness and collektiveness*)

Tujuan Khusus PPM adalah mengalang dan mengembangkan lembaga swadaya fungsional (LSF) dan jaringan kerjasama di antaranya pada tingkat lokal, daerah, wilayah dan nasional, kearah terwujudnya gerakan peradaban dan kebudayaan (*civilization and cultural movement*) yang mengacu kepada kepentingan rakyat.



PENDEKATAN

Perumusan Masalah

PPM menaruh keprihatinan dan kepedulian terhadap keseluruhan permasalahan struktural dan kultural, yang secara garis besar dapat dicirikan dalam tiga permasalahan pokok. Pertama, permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar rakyat, serta telah merasuk dalam tata nilai dan sistem/struktur kemasyarakatan dan telah menciptakan situasi batas budaya kemiskinan. Kemiskinan telah diterima menjadi keniscayaan hidup yang tidak perlu dipertanyakan, karena berani hidup diartikan berani miskin, sehingga melawan kemiskinan dipandang sebagai perbuatan ahistoris dan asosial. Kita benar-benar telah miskin terhadap arti kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu menganggap kemiskinan sebagai suatu realitas ekonomi mikro saja merupakan simplifikasi yang berlebih-lebihan, seolah-olah masalah yang telah menjarah ini bisa diatasi dengan cukup melalui pembinaan permodalan, ketrampilan, dan manajemen.

Masa miskin inilah yang selalu tertinggal dari proses pembangunan dan modernisasi, serta sering mengalami keterasingan (*alienasi*), penekanan (dominasi), penjinakan (*domestikasi*), pengikisan (*likuidasi*), pencabutan (marginalisasi) dan pendesakan oleh sektor mapan perkotaan (*gentrifikasi*).

Kedua, rapuhnya penjembatanan hubungan antar subkultur, *khususnya* antar etnik, antar ruang, antar lapis, dan antar corak penghayatan keagamaan. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya integrasi yang emansipatoris, serta menghambat tumbuhnya interaksi akulturatif ke arah integrasi partisipatoris.

Ketiga, kegagalan dalam mengembangkan partisipasi proaktif dalam pembangunan. Kegagalan ini di samping menyebabkan kita kurang berhasil menangkap semangat zaman dan meraih kesempatan untuk berkembang selaras dengan aktualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menyebabkan kita gagal menghayati keberadaan dan tanggung jawab sebagai bagian dari peradaban dunia. Dunia semakin bergerak ke arah integrasi yang fungsional, menuju prinsip "hanya satu dunia dan satu untuk semua".

Pihak yang Bertanggung Jawab

Permasalahan pertama di atas menunjuk adanya keadaan pancaroba pada keseluruhan kompleks kebudayaan, yang menyembul dalam tingkat motivasional, kecenderungan-kecenderungan dan perilaku konkrit masyarakat. Sedangkan permasalahan ke-dua menunjuk pada keadaan belum tercapainya kesamaan basis budaya untuk perkembangan di masa depan, sehingga partisipasi kurang produktif, jika tidak malah hanya memunculkan partisipasi negatif yang hanya produktif dalam menghasilkan konflik. Sedangkan permasalahan terakhir menunjuk rendahnya budaya kemajuan dan tingginya budaya rendah diri; sesuatu yang sungguh tipikal



pada masyarakat yang mayoritas beragama islam pada era tranparansi global pada saat ini.

Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap munculnya tragik sejarah masa lalu dan masa depan ini? Jawabannya : Umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Kegagalan menangkap api islam sebagai ajaran fakku raqabah, pembebasan dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, serta kecenderungan involusi ajaran yang mendorong formalisme dalam penerapan ajaran, adalah sebagian masalah yang menyebabkan bangsa dan negeri ini belum berdaya dalam menolong dirinya sendiri; mejadi bangsa hina dan dihina dalam hubungan antra bangsa.

Menyadari hal ini, maka PPM tanpa ragu mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan peradaban dan kebudayaan alternatif di kalangan umat islam (intra) dalam kebersamaan dengan masyarakat agamawan lain (inter) untuk secara bersama sama dan bekerja sama mewujudkan peradaban dan kebudayaan nasional yang kuat dan mampu membangun sejarah masa depan Bangsa dan Negara Kesatuan republik Indonesia (BNKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 45 sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945

Gerakan Perubahan Peradaban dan Kebudayaan

Kebudayaan (*culture*) menunjuk pada perubahan komplek pranata, atau perubahan komplek kepercayaan (*religious belief*) dan sistim nilai dasar (*basic value system*) yang mewarnai level motivasional dan berpengaruh dalam pembentukan kecenderungan – kecenderungan (*trends*) masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebudayaan karena itu, pranata atau arus bawah (*under-current/down streams*) dalam samudara kehidupan. Sedangkan peradaban (*civilization*) adalah kebiasaan tingkal laku dan upaya sehari hari masyarakat (*efforts*). Karena sifatnya, maka peradaban adalah kertata atau arus atas (*current/upper streams*) dalam samudara kehidupan. Prata sendiri merupakan jembatan penghubungan antara kebudayaan dengan peradaban, antara pranata dengan kertata, sehingga sebagai middle streams ia memiliki spectrum ke arus atas (*membatasi*) dan ke arus bawah (*merubah*).

Dalam samudera kebudayaan dan peradaban, betapapun dapat diterima adanya pandangan bahwa arus bawah (*pranata*) mendasari dan mewarnai (baca: membatasi) arus atas, namun perubahan tidak akan efektif jika dimulai dari perubahan sistim kepercayaan dan sistim nilai, karena ia laten dan kokoh, melekat pada pengalaman kesejarahan masyarakat yang panjang, sehingga mudah menimbulkan penentangan, bahkan fitnah. Perubahan juga tidak efesien jika dimulai dari perubahan mode tingkah laku sebagai arus paling atas dari peradaban, kerena pernik perniknya banyak, sering bahkan ecek ecek, dengan pengaruh yang hanya sesaat. Perubahan akan lebih strategis manakala dimulai melalui pengembangan kelembagaan alternatif



(arus tengah/pranata); suatu marginal group untuk mencari dan menemukan (*discovery and re-discovery*), serta mencoba dan mencoba lagi (*trial and error*) hal hal baru. Jika suatu kertata dan pranata itu ternyata baik dan benar, maka kelembagaan marginal tersebut akan memancarn (*efek sentrifugal*) dan menarik (*efek sentripetal*) masyarakat untuk ikut dalam perubahan.

Ada lima acuan agar sesuatu memenuhi prasyarat sebagai gerakan perubahan kebudayaan dan peradaban (*civilization and cultural*), yaitu:

1. Berpegang pada prinsip dari oleh masyarakat.
2. Menyelaraskan diri dengan dan atau dapat dikeangkan dalam pengalaman kesejarahan dan sistim nilai budaya masyarakat;
3. Menyesusiakan dengan proses belajar (*learning process*) dan kapasitas belajar (*learning capacity*) masyarakat terhadap hal halbaru;
4. Mengandalkan pada tumbuhnya stimuli dalam masyarakat sendiri;
5. Tegak di atas kemampuan swadaya murni secara penuh dan menyeluruh.

Oleh sebab itu gerakan kebudayaan senantiasa diwarnai oleh berbagai usaha "kecil – kecilan" untuk membentuk situasi empirik, yang memungkinkan masyarakat mencoba hal-hal baru dan/atau me-ngupayakan hal-hal baru yang lebih fungsional, ber-manfaat, dan bermasa depan. Situasi empirik ini meru-pakan wahana belajar untuk bersama. Dalam wahana belajar masyarakat dapat secara langsung dan mendalam melakukan kegiatan aksi dan ekspresi untuk memenuhi minat, kebutuhan, dan kepentingannya, serta sekaligus belajar dari kegiatan itu sendiri untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karena sifatnya, maka gerakan kebudayaan senantiasa mempertahankan keruntutan proses sejarah yang melatari dan nilai – nilai budaya yang terkandung, serta menghindari terjadinya anakronisme, lompatan budaya, dan gejala – gejala ahistoris lainnya. Meskipun demikian gerakan kebudayaan tetaplah mengacu dan berpihak kepada masa depan dan kemajuan.

Karena perubahan kebudayaan dan peradaban itu berdimensi tunggal: sejarah, maka persyaratan elementer gerakan PPM juga harus memenuhi kualifikasi sebagai proses perubahan sejarah: Perubahan dalam rentang ruang dan waktu yang luas dan panjang, serta massif.



METODOLOGI

Dinamisasi Sistem dan Struktur Kemasyarakatan

Ukuran yang paling adil dari penerapan metode gerakan kebudayaan adalah hanya satu, tunggal tidak jamak, yaitu : Sejarah. Oleh sebab itu pertanyaan yang relevan dalam metode ini, bukan pada apa yang dapat diberikan PPM kepada masyarakat, melainkan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk diri sendiri. Dalam PPM, masyarakat dapat melakukan sesuatu dan belajar dari apa yang dia lakukannya sendiri. PPM sebagai wahana berkarya dan belajar (learning community) pada dasarnya universitas kehidupan (university of life). Tetapi, apa yang dapat dilakukan PPM hanyalah berupaya menyediakan sebanyak mungkin prasyarat agar rakyat bangkit ber-swadaya untuk menolong, membangun, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam pemenuhan minat, kebutuhan, dan kepentingan bersama. PPM lebih hanya menekankan pada arti penting dinamisasi sistem dan struktur kemasyarakatan yang menyelimuti kehidupan rakyat.

Sebagai misal, di lingkungan masyarakat miskin sering ada keluhan kekurangan modal (dana) untuk merintis usaha yang sekiranya menguntungkan. Tetapi, sama sekali tidak ada jaminan masalahnya terselesaikan dengan diberi dana. Sebab, peristiwa tidak ada dana, pada dasarnya adalah peristiwa tentang adanya faktor – faktor yang melingkupi yang menyebabkan tidak ada dana atau modal. Nah, singkaplah faktor – faktor itu rubahlah! Mungkin mereka kurang kerja keras? Atau sudah cukup bekerja keras, tapi tidak memiliki cukup faktor produksi yang *liquid* ? atau mungkin faktor produksinya cukup dan semangat kerjanya tinggi, tapi barangkali dia tidak cukup memiliki informasi, koneksi dan proteksi untuk membuka kesempatan untuk dirinya? Realita kemiskinan bukan realitas kekurangan modal, atau keterbatasan keterampilan dan manajemen, melainkan menunjuk pada adanya kendala yang bersifat struktural dan makro.

Di suatu masyarakat mungkin ada keluhan tidak ada air. Seseorang pekerja sosial seyogyanya tidak perlu langsung memberi pompa hidram atau pipanisasi air dari sungai yang jauh ke lokasi itu. Masalahnya, mungkin masyarakat belum menggali sumur? Atau, sudah menggali tapi kurang dalam ? Atau, sudah cukup dalam air tapi air tetap tidak ada ? Mengapa penduduk masih mau tinggal di situ? Atau perlu pertanyaan yang lebih ke belakang lagi bagaimana sejarah pemikiran itu? Dan, bagaimana sampai air tidak ada? Mengapa mereka tidak pindah tempat saja atau bertransmigrasi? Pertanyaan – pertanyaan ini perlu di jawab dahulu. Tetapi jika tetap perlu dimasukkan teknologi pengadaan air, seyogyanya mereka sendiri yang mengusahakan, bukan pekerja sosial. Mengapa?

Adagium PPM: Jangan beri seseorang itu ikan, sebab dia hanya bisa makan sehari. Tapi, tak perlu juga di beri pancing, sebab belum tentu dia suka memancing, atau yang pasti, dia bukan anak kita. Yang bisa kita lakukan ialah menempelengi



mereka (secara; metodologis) untuk membantu bereka meraih harga diri dan tanggung jawabnya sendiri. Sebagian sangat besar peristiwa kemiskinan terkait dengan pertanyaan: *Who Am I?*

Dalam PPM, yang terpenting adalah idiologi kerakyatan dan metodologi pengembangan masyarakat. Dari waktu ke waktu PPM menimpa pengalaman, bahwa muatan terbesar dalam idiologi itu adalah metodologi. Sebagai contoh, *ainul yaqin*, bahkan *haqqul yaqin*, pemerintah sungguh mati ingin membangun rakyat. Tetapi karena ekonom dan teknokrat konsultan pembangunan tidak pernah belajar tentang sosial ekonomi kerakyatan, maka yang muncul adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan padat karya yang hanya memberikan kesempatan kerja sesaat kepada rakyat, itupun tidak merata. Pengentasan kemiskinan dan pengantasan pengangguran dianggap sebagai fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dikaitkan dengan cadangan devisa, neraca pembayaran, nilai tukar dan laju inflasi, sehigga pemerintah sebagai public corporation hanya perlu berurusan dengan dunia usaha swasta besar, BUMN dan dirinya sendiri (sektor pemerinahan). Pengentasan kemiskinan dana pengatasan pengangguran dianggap hanya tergantung pada kemakmuran ketiga sektor modern ini sebagai *broker* kemiskinan dan pengangguran. Dan ketika broker ini jeblok, maka rakyat mengalami jeblok yang *ekstrapolatif*.

Menyadari hal ini, apalagi setelah berakhir blok Timur Barat, maka PPM semakin bergerak ke tengah dan menjadi "Gerakan Jalan Tengah" untuk mengedapankan metodologi sembari mentransformasikan ideologi menjadi *ideopraxis*, *idiologi aplikatif*.

STRATEGI GERAKAN

Stelsel Masyarakat Sejahtera

Gerakan kebudayaan niscaya menaruh perhatian pada pengembangan manusia seutuhnya. Wahana pembinaan manusia kearah reformasi kebudayaan ini dilaksanakan pada komunitas terkecil setingkat desa atau kampung, serta di kalangan masyarakat sekerja. Untuk itu dikembangkan model pengembangan masyarakat sejahtera (*qaryah thayyibah*) dalam bentuk stelsel.

Stelsel masyarakat sejahtera ini adalah suatu kondisi yang tergantung (*well organized*) pada suatu komunitas atau masyarakat sekerja, yang berkemampuan untuk menggerakkan para anggota masyarakat kepada kehidupan yang utuh, seimbang, dan mencukupi.

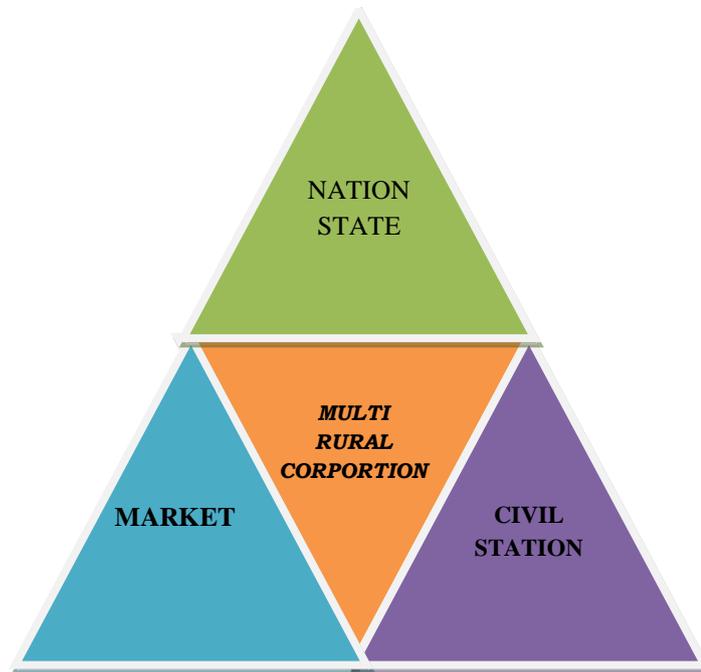
Keutuhan dan keseimbangan individu/masyarakat/komunitas, yaitu : suatu kondisi sama sebangun antara aspek keatasan (nilai), kedirian (diantaranya ekonomi) dan menyamping (sosial), dalam suatu perwujudan interaktif, sehingga menciptakan



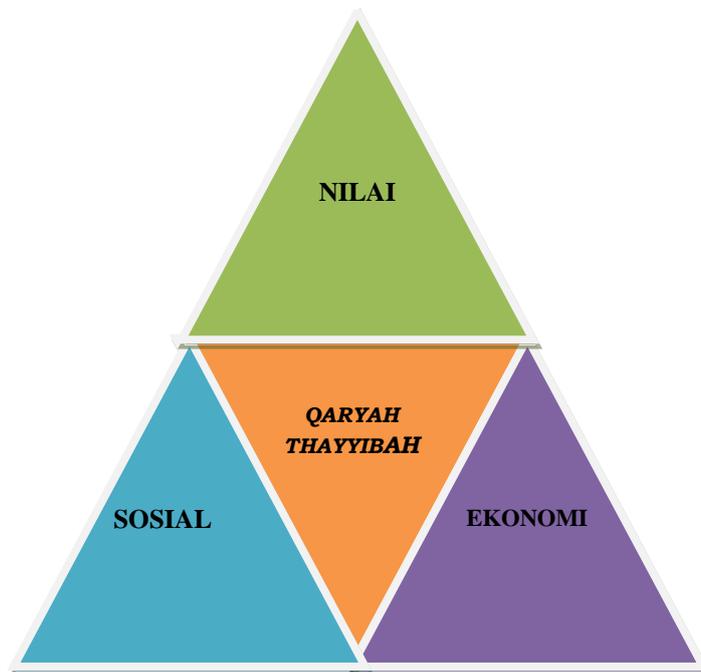
bidang setimbang insan al kamil (individu) dan *qaryah thayyibah* masyarakat/komunitas)

Kecukupan yang pokok dalam suatu stelsel masyarakat sejahtera, khususnya yang perlu memperoleh perhatian dalam pengembangan masyarakat ada delapan bidang, yaitu :

1. Sosial ekonomi
2. Pendidikan alterantif
3. Kesehatan masyarakat
4. Teknologi tepat
5. Lingkungan hidup
6. Sosial budaya
7. Kependudukan
8. Emansipasi social



MULTI RURAL CORPORATION



QORYAH THAYYIBAH (DESA MANDIRI)

Lembaga Swadaya Fungsional (LSF)

Suatu stelsel masyarakat sejahtera mensyaratkan perlunya diupayakan suatu kondisi masyarakat yang teroganisir. Untuk itu pada suatu komunitas atau di lingkungan masyarakat sekerja perlu digalang dan dikembangkan kelembagaan pratata, yaitu : Lembaga Swadaya Fungsional (LSF)

Ciri pokok LS/F ialah :

- 1) Kelembagaan primer yang menampung keanggotaan orang perorang pada suatu komunitas terkecil setingkat desa, atau di kalangan masyarakat sekerja
- 2) Kelembagaan swadaya yang mengandalkan ke-seluruhan perkembangannya pada kemampuan diri sendiri secara murni, penuh, dan menyeluruh.
- 3) Kelembagaan fungsional yang berkemampuan melaksanakan pengembangan anggota alternatif, kesehatan masyarakat, teknologi tepat, lingkungan hidup, sosial budaya, kependudukan, dan eman-sipasi social
- 4) Kelembagaan konsiliatif yang menjembatani hubungan antar kelompok agar duduk di satu meja, guna memecahkan masalah, kebutuhan dan kepentingan bersama.
- 5) Kelembagaan marginal yang memperkenalkan hal – hal baru dan memberi kesempatan kepada anggota untuk mengupayakan hal-hal baru yang bermanfaat.



- 6) Kelembagaan poligon dalam rangka pengembangan suatu kawasan bersama – sama LSF lainnya.
- 7) Kelembagaan emansipatoris yang menjalankan fungsi pembangkitan, penguatan dan pembelaan potensi lokal dan masyarakat anggota.

Jenis LSF bermacam–macam menurut pilihan kegiatan pokoknya, di antara delapan bidang pengembangan masyarakat. Sebagai misal, suatu LSF yang mempunyai kegiatan pokok kesehatan masyarakat dapat membentuk bakesmas (Balai Kesehatan Masyarakat), dengan tetap mengupayakan bidang pengembangan masyarakat. Sebagai misal, suatu LSF yang mempunyai kegiatan pokok kesehatan masyarakat dapat membentuk Bakesmas (Balai Kesehatan Masyarakat), dengan tetap mengupayakan bidang pengembangan masyarakat yang lain sebagai perluasan kegiatannya. Demikian juga LSF yang mengambil bidang kegiatan pokok sosial ekonomi (misal UB/ Koperasi) pendidikan alternatif (misal majlis ta'lim) tetap perlu juga mengembangkan bidang pengembangan masyarakat yang lain. Sebab, LSF secara sendiri atau antara LSF merupakan embrio untuk terbentuknya kondisi well organized suatu komunitas atau lingkungan masyarakat sekerja, sebagai prasyarat terbentuknya stelsel *qaryah thayyibah*.

Bentuk LSF dibedakan dalam dua jenis, yaitu : sebagai penampung partisipan masyarakat secara massif dan sebagai gugus kerja kader PPM. Dalam bentuk pertama, maka keanggotaan LSF terbuka luas untuk semua anggota masyarakat yang berminat dan bisa memenuhi ketentuan organisasi. Yang termasuk LSF jenis ini, di antaranya UB/Koperasi, majlis ta'lim, dan sebagainya. Sedangkan LSF sebagai gugus kerja, keanggotaannya terbatas pada mereka yang berkepentingan saja. Contoh dari LSF gugus kerja, diantaranya ialah kepanitiaan untuk menggalang bina balita, menggalang pendirian sekolah, menggalang berdirinya bakesmas dan sebagainya. Selanjutnya anggota LSF gugus kerja ini dikoordinasi oleh PPM setempat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil kegiatan tersebut.

KEGIATAN DAN PELAYANAN

PPM pada semua tingkat dan LSF melaksanakan berbagai kegiatan secara sendiri atau bekerjasama, meliputi delapan bidang pengembangan masyarakat, yang terinci :

Pengembangan Sosial Ekonomi

- 1 UB/Koperasi
- 2 Perkreditan Islami
- 3 Jaringan ekonomi antar desa
- 4 Sistem pertanian kolektif



- 5 Bina manajemen usaha kecil
- 6 Bina tenaga kerja dan kesempatan kerja

Pengembangan Pendidikan Alternatif

- 1 Pendidikan wahana / komunitas
- 2 Pendidikan informal dan non – formal
- 3 Pendidikan persekolahan – plus
- 4 Majelis Ta'lim
- 5 Perpustakaan rakyat
- 6 Bengkel instrumen pendidikan

Pengembangan Kesehatan Masyarakat

- 1 Bina gizi dan nutrisi
- 2 Pengembangan Kesehatan Masyarakat (PKMD)
- 3 Balai Kesehatan Masyarakat (Bakesmas)
- 4 Bina Balita

Pengembangan Teknologi Tepat

- 1 Teknologi pertanian dalam arti luas
- 2 Teknologi pasca panen
- 3 Kerajinan
- 4 Teknologi non-pertanian untuk industri kecil
- 5 Teknologi pemukiman/lingkungan

Pengembangan Lingkungan Hidup

- 1 Penetapan norma lingkungan dan tata ruang pemukiman
- 2 Konservasi tanah dan air (fisis), biotis dan kimiawi yang menyangkut hajat ekonomi rakyat
- 3 Pemberantasan polusi
- 4 Pengendalian pemberantasan hama secara kimiawi

Pengembangan Sosial Budaya

- 1 Kesenian rakyat
- 2 Cerita rakyat
- 3 Kesenian modern dan kreasi baru



- 4 Olah raga kesehatan dan prestasi
- 5 Bina kreativitas remaja

Pengembangan Emansipasi Sosial

- 1 Perlindungan penduduk pinggiran kota dan pedesaan dari kemungkinan gentrifikasi sektor perkotaan modern
- 2 Perburuhan
- 3 Pembelaan kondisi emansipatoris masyarakat desa, suku terasing, dan masyarakat miskin perkotaan
- 4 Hak dan peranan perempuan

Pengembangan Kependudukan / Transmigrasi

- 1 Transmigrasi swakarsa
- 2 Integrasi kelompok muhajirin – anshar
- 3 Pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana

Dalam kerangka pendekatan pengembangan model SAQT (*Stelsel Aktif qaryah thayyibah*) maka penerapan kegiatan kedelapanan bidang pokok pengembangan masyarakat tersebut dilakukan dalam suatu komunitas atau lingkungan masyarakat sekerja. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya pendekatan pengembangan masyarakat secara komprehensif dan holistik. Dengan kata lain, penerapan kegiatan dan pelayanan PPM tidak dilakukan per item kegiatan pelayanan, melainkan dalam keseluruhan paket ke arah qaryah thayyibah.

ORGANISASI PPM

Keanggotaan

1. Anggota Perorangan

Terdiri dari orang dewasa, laki laki dan perempuan yang direkrut oleh PPM pada semua tingkat, dicatat keanggotaannya oleh PPM Nasional dan catatan bantuan oleh PPM semua tingkat dan kordinasi pembinaan dan partisipasinya dilakukan oleh PPM Daerah di bantu PPM di bawah dan di atasnya.

2. Anggota Kelembagaan

Terdiri dari yayasan, ormas atau kelembagaan lokal yang bersifat profit atau nonprofit, seperti penyelenggara pendidikan, pondok pesantren, balai latihan kerja, balai kesehatan dan rumah sakit, panti asuhan, lembaga studi dan penelitian, LSM, pengelola tempat ibadah dan lembaga lembaga lokal yang berbasis pada masyarakat yang memiliki formalitas badan hukum maupun yang belum atau yang tidak memerlukan formalitas tersebut. Rekrutmen dan pecatannya sama seperti anggotaperorangan, akan tetapi kordinasi pembinaan



dan pengerahan partisipasinya dapat dilakukan oleh PPM pada semua tingkat yang terkait.

3. Anggota Badan Usaha

Terdiri dari peruruan perusahaan yang berbadan hukum seperti; koperasi, CV, dan PT serta satuan satuan usaha yang tidak atau belum berbadan hukum. Pengembangan kerja sama kelembagaan secara konsorsium atau yang bersifat kerja sama longgar di upayakan untuk meningkatkan kinerja usaha.

4. Badan Otonom

Badan otonom adalah perangkat organisasi PPM pada semua tingkat untuk mendukung PPM dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain atau menjalankan fungsi yang dibebankan PPM kepadanya, serta kewajiban mendukung PPM dalam pembinaan anggota (perorangan, kelembagaan dan badan usaha). Badan Otonom PPM (BO PPM) meliputi:

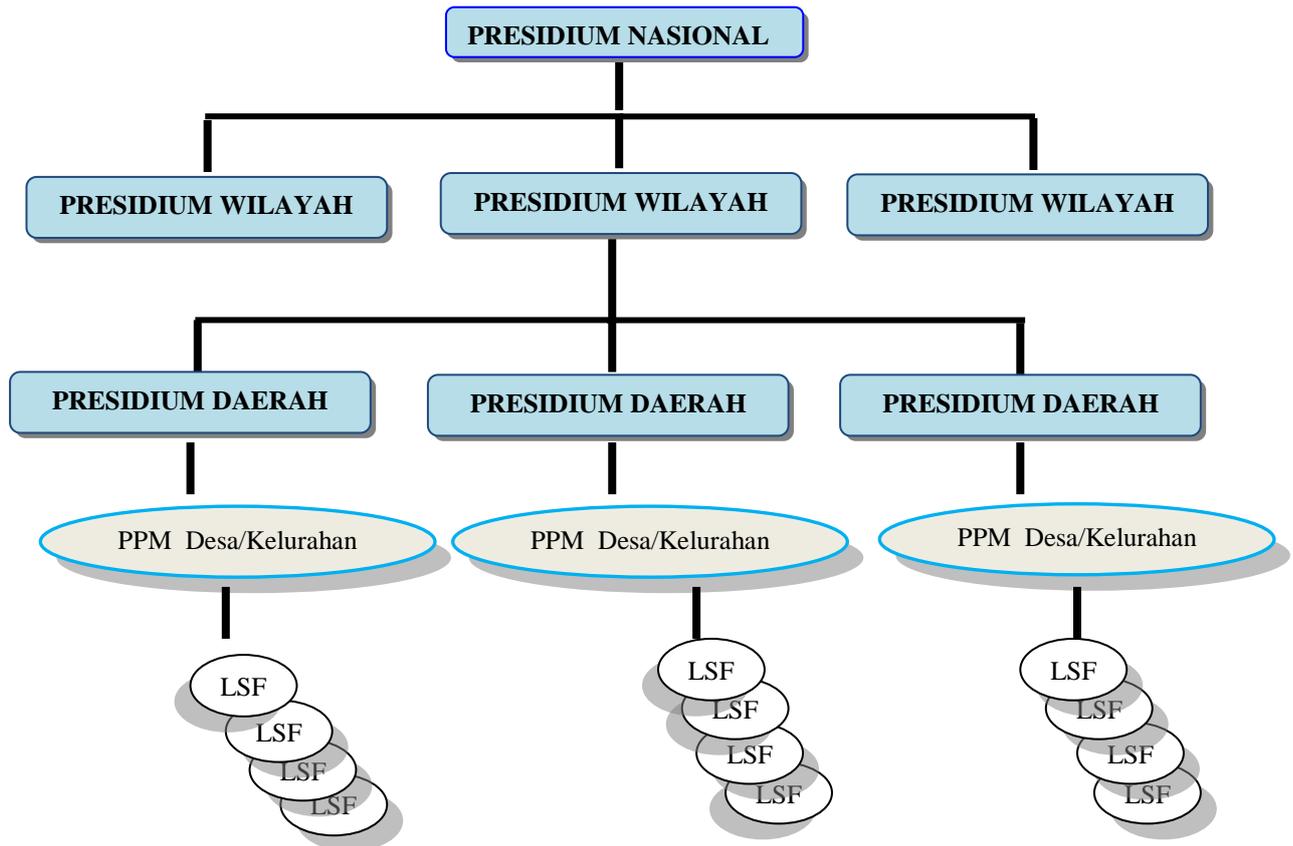
- 1) Pusat Peranserta Wanita (PPW),
- 2) Angkatan Muda Peranserta (AMARTA),
- 3) Masyarakat Ekonomi Peranserta (MEP),
- 4) Masyarakat Informasi Peranserta (MIP),
- 5) Sanggar Kesenian Peranserta (SANKERTA),
- 6) Perhimpunan Pesantren Kejuruan Umatan Wasathan (PKUW),
- 7) Da'i Peranserta Pembangunan (DERAP),
- 8) Jaringan Pengembangan Sektor Informal (JPSI),
- 9) Asosiasi Pedagang Kali Lima Se-Indonesia (APKLI),
- 10)Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Se-Indonesia (APGKI),
- 11)Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS)

Jenjang Kelembagaan

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Presidium Nasional | : PPM Nasional |
| 2. Presidium Wilayah | : PPM Wilayah |
| 3. Presidium Daerah | : PPM Daerah |
| 4. Pengurus Kecamatan | : PPM Kawasan |
| 5. Pengurus Desa/Kelurahan | : PPM Desa/Kelurahan |



BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN





Musyawarah

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. PPM Nasional | : Pertemuan Nasional (5 tahunan)
Sidang Dewan Pleno Nasional (tahunan) |
| 2. PPM Wilayah (propinsi) | : Pertemuan Wilayah (5 tahunan)
Sidang Dewan Pleno Wilayah (tahunan) |
| 3. PPM Daerah (kab/kota) | : Pertemuan Daerah (5 tahunan)
Sidang Dewan Pleno Daerah (SDPD) |
| 4. PPM Kecamatan | : Pertemuan Kecamatan (5 tahunan)
Sidang Dewan Pleno Kecamatan (tahunan) |
| 5. PPM Desa/Keluraha | : Pertemuan Desa/Kelurahan (5 tahunan)
Sidang Dewan Pleno Desa/Kelurahan (tahunan) |

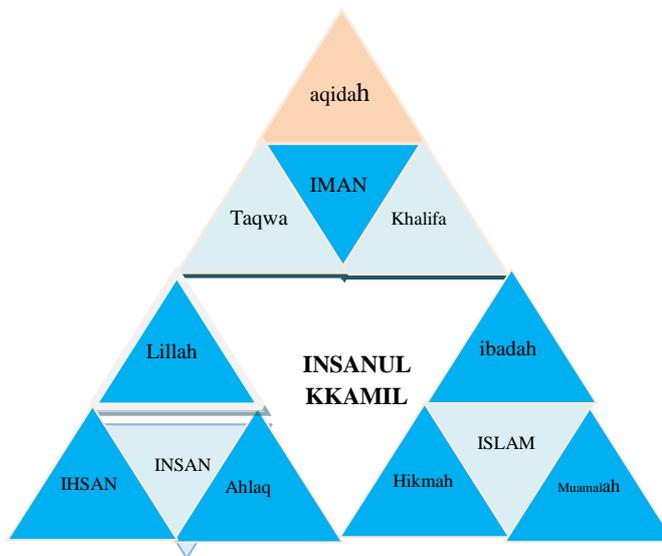
Sumber Dana

1. Perusahaan dan badan otonom di lingkungan PPM pada semua tingkat.
2. Badan – Badan Usaha Milik PPM
3. Iuran Anggota
4. Kontribusi atas keuntungan anggota
5. Kerja sama investasi domestik dan international
6. Aliansi fungsional
7. Sumb

Menjadi PPM

Kualifikasi Pribadi

Pada dasarnya PPM adalah harakah ummatan wasathan, atau gerakan masyarakat yang setimbang, yang hanya mungkin diwujudkan oleh kader yang berpribadi setimbang. Kondisi ini bukan semena mena artinya siapapun dia asal bersedia masuk dan mengalami pengalaman metodologi PPM, IsyaAllah akan tumbuh menjadi pribadi yang setimbang. Sebab, di samping fungsinya sebagai lembaga penggerak dan penampung karya cipta anggota, PPM juga learning society atau wahana belajar untuk bersama bagi para anggota, untuk mencapai dan derajat insanul kamil atau insan yang baik dan benar yang lebih tinggi dan berguna untuk kemanusiaan.



BANGUNAN KESETIMBANGAN GEOMETRIS

INSANUL KAMIL

Kualifikasi Karya

Gerakan kebudayaan niscaya menaruh perhatian pada pengembangan manusia seutuhnya. Wahana pembinaan manusia kearah refomasi kebudayaan ini dilaksanakan pada komunitas tekecil setingkat desa atau kampung, serta di kalangan masyarakat sekerja. Untuk itu dikembangkan model pengembangan masyarakat sejahtera (qaryah thayyibah) dalam bentuk stelsel.

Stelsel masyarakat sejahtera (SMS) ini adalah suatu kondisi kecil yang well organized pada suatu komunitas atau masyarakat sekerja, yang berkemampuan seimbang, dan mencukupi. Keutuhan dan keseimbangan individu/masyarakat/komunitas yaitu; suatu kondisi sama sebangun antara aspek keatasan (nilai), kedirian (diantaranya ekonomi) dan menyamping (sosial), dalam suatu perwujudan interaktif, sehingga menciptakan bidang setimbang insan al kamil (individu) dan qaryyah thayibah (masyarakat/komunitas). Di sini karya setiap kasder jadi penting, bukan saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi individu yang berkarya. PPM memandang bahwa poduktifitas itu kualitas.

PPM terbuka untuk seluruh rakyat indonesia yang berminat mengembangkan peranserta dalam pengembangan masyarakat secara produktif dan kualitatif. Seperti diuraikan di depan, bahwa peranserta anggota PPM di tampung dalam Lembaga Swadaya Fungsional (LSF) pada tingkat desa atau di kalangan masyarakat sekerja, dalam aneka ragam LSF yang ada, baik LSF sosial-kerakyatan maupun ekonomi kerakyatan, serta menggabungkannya menjadi stelsel masyarakat sejahtera (SMS)



Pelatihan

PPM menyediakan latihan dalam tiga jenjang yaitu: Latihan Pengembangan Masyarakat tingkat Dasar (*Basic Training for Community Development*), Latihan Pengembangan Masyarakat tingkat Lanjut (*Advanced Training for Community Development*), serta Latihan Paripurna (*Senior Course*)

LPM I yang berlangsung 28 sesi selama 3 (tiga) hari (*in class training*) akan membantu kader mencapai kembali dirinya, dan karena itu dia menjadi insan kreatif, yang dilanjutkan dengan *i-field training* selama 2 bulan, sehingga kader mampu menggalang dan mengelola LSF yang dia pilih sendiri, dan atau mewujudkan atau meningkat prestasi individual dalam profesi yang dia pilih (penguasa, penulis, peneliti dan sebagainya)

LPM II dalam waktu yang sama dengan LPM I, akan membantu kader agar semakin mancapai dirinya, dan karena itu dia menjadi semakin kreatif dalam membina dan mengembangkan LSF dalam aneka jenis LSF pada *in-field training* selama 2 bulan dan atau mengembangkan profesi individualnya.

Latihan Paripurna adalah wahana workshop untuk merancang karya – karya kekhalfahan yang signifikan yang sudah sepatutnya disandang kader – kader yang telah memiliki pengalaman dalam pengembangan masyarakat dan atau telah meraih prestasi profesi individual.

PPM PADA SAAT INI

Pada usia PPM yang lebih perempat abad (1985 – 2022) PPM telah menjangkau 25 propinsi, yaitu : Aceh (NAD), Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Dari seluruh wilayah ini telah terjangkau 404 lokasi penggalangan UB/ Koperasi. Di lokasi yang sama juga beberapa telah digalang kegiatan majlis ta'lim, persekolahan, bakesmas, kelompok kesenian, dan kelompok–kelompok fungsional lainnya. Dan telah terbentuk 11 Badan Otonom (BO PPM) meliputi Pusat Peranserta Wanita (PPW), Angkatan Muda Peranserta (AMARTA), Masyarakat Ekonomi Peranserta (MEP), Masyarakat Informasi Peranserta (MIP), Sanggar Kesenian Peranserta (SANKERTA), Perhimpunan Pesantren Kejuruan Umatan Wasathan (PKUW), Da'i Peranserta Pembangunan (DERAP), Jaringan Pengembangan Sektor Informal (JPSI), Asosiasi Pedagang Kali Lima Se-Indonesia (APKLI), Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Se-Indonesia (APGKI), Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS)

Saat ini, pada periode kepengurusan 2009–2013 dicanangkan tahapan konsolidasi dari apa yang telah dicapai pada periode pertama meliputi 3 (tiga)



konsolidasi, yakni konsolidasi wawasan (ideology dan metodologi), konsolidasi organisasi (jaringan), dan konsolidasi program

Konsolidasi wawasan/ideologi dimaksudkan sebagai upaya bagaimana wawasan dan misi PPM difahami, dihayati dan diwujudkan dalam karya-karya nyata organisasi mengacu pada kalangan aktivis PPM. Konsolidasi organisasi mengacu pada kalangan aktivis PPM. Konsolidasi organisasi mengacu pada proses pemantapan transisi dari PPM sebagai konsosium ke arah PPM sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diputuskan dalam Pertemuan Nasional II PPM di Yogyakarta, bulan Mei 1989, sedangkan konsolidasi program menunjuk pada adanya upaya untuk menginventarisasikan, mendokumentasi-kan, dan mengkomunikasikan apa saja yang telah dilakukan PPM sejak sebelum secara formal berdiri 30 Januari 1985 sampai sekarang, untuk dapat ditarik pelajaran yang berharga baik dari segi keberhasilan mau-pun kegagalannya. Hanya dengan demikian, PPM sebagai gerakan kerakyatan sekaligus gerakan kebudayaan dapat dilacak kesejarahannya, dalam rangka orientasi ke masa depan.

BAGAIMANA CARA BER – PPM

Mudah saja, Pertama, marilah kita nota niat, bahwa setiap diri itu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan sejarah. Suatu tanggung jawab yang perlu diletakkan sejajar dengan tanggung jawab terhadap keluarga sendiri, setidaknya sampai surutnya gejala kemiskinan dan keterbelakangan yang mewarnai kehidupan sebagian besar rakyat.

Kedua, setelah ini cobalah ajak orang lain untuk ikut bertanggung jawab memikul kewajiban sosial ini. Sampai di sini terbuka dua pilihan : (i) Bentuk LS/F gugus kerja dengan melibatkan beberapa orang yang dipandang inti, untuk menampung sedikitnya 20 orang lewat PPM Nasional. PPM Nasional akan segera menghubungkan anda dengan sistem pelayanan PPM yang tepat.

KEPENGURUSAN PRESIDIUUM NASIONAL

PPM Nasional dipimpin oleh kepemimpinan kolektif-kolegial yang pada periode pertama disebut Dewan Direktur, dan pada periode-periode berikutnya disebut Presidium Nasional, dengan periodisasi:

1985 -1989	1989 - 1993	1994 - 1998	1999 - 2004	2005 – 2009
Adi Sasono	Drs. Hadimulyo, M.Sc	Prof. Dawam Raharjo, S.E	Drs. Hadimulyo, M.Sc	Ir.Bambang Agussalam, M.Sc
Drs. M. Habib Chirzin	Ki Suratno Hayuningrat	Drs. M. Habib Chirzin	Ir. Moch. Jumhur Hidayat	Sa'dudin, S.E



Ali Mustofa Trajutisna	I Yoman Parito	Dre. A Mafaid Harahap	Abdullah Syihab, S.E, M.Sc	Drr. H. M. Soleh
Hery Yosy Yuswanto	Mursalin Dahlan	Ir. Abdul Aziz, MM	Drs. Priyo Abdurahman, M.A	Iman Nur Hidayat
	Suharyadi	Drs. Suwarsono, M.A	Nur Chalib Chatib, S.E	H. Drs, Farid Fathoni, Af, S.H

Khusus untuk periode 1998 - 2004, terdapat konsesus di antara anggota Presidium Nasional tentang perlunya rotasi kepemimpinan secara periodik selama masa kepengurusan. Pada Pertemuan Nasional (Penas) VI di Solo Desember 2009 kepengurusan mengalami perubahan dari Sistim Presidium Nasional (colectif colegial) menjadi Dewan Pimpinan Nasinol dengan Sistem Kepemimpinan.

Dengan Susunan Kepengurusan tahun 2009 – 2014:

Ketua Umum : Ir Moch. Jumhur Hidayat
Wakil Ketua : In Parito
Wakil Ketua : Guntoro Soewarno
Wakil Ketua : Salim Achmad
Sek Jenderal : Pupun Purwana
Wasekjen : Defri Cane Nasution, S.Ag
Bendahara : Anwar Haryono :
Wakil Bendahara : Ir. Menik Sumasroh

Sidang Dewan Pleno Nasional (SDPN) I tanggal 30 – 31 January 2011, salah satu satu rekomendasi adalah perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Pusat Peranserta Masyarakat, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua Umum : Ir Moch. Jumhur Hidayat
Wakil Ketua : In Parito
Wakil Ketua : Defri Cane Nasution, S.Ag
Wakil Ketua : Salim Achmad
Sekretaris Jenderal : Drs. Mahmudin
Wasekjen : Ainur Rogiq
Bendahara : Anwar Haryono :
Wakil Bendahara : Ir. Menik Sumasroh



Sidang Dewan Pleno Nasional (SDPN) II tanggal 29 – 30 January 2013, salah satu rekomendasi adalah perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Pusat Peranserta Masyarakat, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua Umum	: Ir Moch. Jumhur Hidayat
Wakil Ketua	: In Parito
Wakil Ketua	: Drs. Mahmudin
Wakil Ketua	: Salim Achmad
Sek Jenderal	: Pupun Purwana
Wasekjen	: M. Hasan Asyary
Wasekjen	: Ainur Rofiq
Bendahara	: Guntoro Soewarno
Wakil Bendahara	: Sri Bimo Ariotejo

Pertemuan Nasioanl VII tanggal 31 Januari s.d 2 Pebruari 2014, telah terbentuk Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Pusat Peranserta Masyarakat Periode 2014 - 2019, sebagai berikut:

Ketua Umum	: Moh Jumhur Hidayat
Ketua Bidang Ekonomi	: Menik Sumasroh
Ketua Bidang Organisasi-Kader	: Defri Cane Nasution
Ketua Bidang Informasi-Luar Negeri	: M. Ghazali Moenawar
Ketua Bidang Sosial-Budaya	: Elang Raja Lukman Zulkaedin
Sekretaris Jenderal	: Farid Fathoni AF
Wakil Sekjend	: M Hasan Asy'ary
Wakil Sekjend	: Yardin Zulkarnain
Wakil Sekjend	: Rohim Purboyono
Wakil Sekjend	: Kerta Umbara
Bendahara Umum	: Pradi Supriatna
Wakil Bendahara Umum	: Alip Purnomo
Wakil Bendahara Umum	: M. Naharussurur



Pertemuan Nasional Luar Biasa tanggal 13 – 14 November 2022, Kepengurusan Pusat Peranserta Masyarakat mengalami perubahan dari Dewan Pimpinan Nasional menjadi Presidium dengan susunan kepengurusan Periode 2021 - 2026, sebagai berikut:

Presidium :

Ketua Presidium : Eko Suryono
Presidium : Farid Fathoni, AF
Presidium : Anas Hidayat
Presidium : Nurhasan Ashari
Presidium : Maesaroh

Sekretaris Jenderal : Anwar Hariyono

Wakil Sekjen : M. Hasan Asyary
Wakil Sekjen : Alif Purnomo
Bendahara : Bambang Soemadji,
Waki Bendara : Bin Subiyanto

SEKRETARIAT

Pusat Peranserta Masyarakat (Centre for People Participation)

*Jl Masjid Al Fajri / F Nomor 3 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Website. ppmnasional.org, Email : dpn.ppm@gmail.com ,*